

Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan terhadap Opini Audit BPK

Samsul Rosadi¹ *, Antin Okfitasari²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta

²Universitas Duta Bangsa

*Email korepondensi: samsul.rosadi@gmail.com

Abstract

This research is aimed to examine the impact of local governmental characteristics and the submission of the financial statements on the audit opinion. The characteristics of local governmental will be measured by using the size of local governmental, governmental spending, locally-generated revenue (PAD), age. The number of samples used is 111 LKPD local governments in Java year 2013. The analysis is conducted by using multiple regression analysis. The results showed PAD had positive effect to BPK audit opinion, but the local governmental spending and time of submission of LKPD had negative effect. The size of local governmental and age did not affect the BPK audit opinion.

Keywords: Characteristics of local government, PAD, Time of submission of financial statements, Audit opinion

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah membuktikan pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan waktu penyampaian laporan keuangan terhadap opini BPK. Karakteristik pemerintah daerah yang digunakan yaitu ukuran daerah, belanja daerah, PAD, umur daerah. Penelitian menggunakan data LKPD pemerintah daerah se-Jawa tahun 2013. Jumlah sampel yang digunakan yaitu sebesar 111 LKPD pemerintah daerah di Jawa. Analisis data yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap opini audit BPK, sedangkan belanja pemerintah daerah dan waktu penyampaian laporan keuangan berpengaruh negatif. Ukuran daerah dan umur daerah tidak berpengaruh, terhadap opini audit BPK.

Keywords: Karakteristik pemerintah daerah, PAD, Waktu penyampaian laporan keuangan, Opini audit BPK

Saran sitasi: Rosadi, S., & Okfitasari, A. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan terhadap Opini Audit BPK. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 19(2), 148-157. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jap.v19i2.326>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v19i2.326>

1. Pendahuluan

Pemerintah daerah merupakan pengelola keuangan daerah yang menjalankan segala kebijakan dari pusat maupun daerah. Masyarakat menuntut pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan yang transparan agar tercipta

kepercayaan masyarakat kepada daerahnya. Dari sisi pemerintahan ada lembaga yang menilai atau mengaudit laporan keuangan daerah yaitu BPK. BPK melakukan audit terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah dengan

memberikan pendapat tentang laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Hasil audit BPK menunjukkan tingkat integritas informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan yang diaudit (Chang, Dasgupta & Hilary, 2009). Dengan demikian dari segi tata kelola keuangan suatu daerah, opini adalah sarana bagi masyarakat dalam menilai apakah tatakelola keuangan didaerahnya telah dikelola dengan baik atau tidak. Opini audit BPK dapat memberikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah jika opini tersebut baik, akan tetapi jika opini laporan keuangan yang diterima oleh daerahnya buruk maka masyarakat juga akan meragukan pengelolaan keuangan di daerah. Apalagi sekarang ini cukup banyak kepala daerah yang melakukan korupsi. Opini laporan keuangan merupakan acuan para investor untuk berinvestasi, dimana jika laporan keuangan suatu perusahaan mendapatkan opini wajar dengan pengecualian, hal ini merupakan sebuah pertanda buruk bagi pengguna laporan keuangan (McLelland & Giroux, 2000).

Tahun 2013 berdasarkan data dari BPK, diperoleh sebanyak 134 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mendapat opini wajar tanpa pengecualian, 269 LKPD mendapat opini wajar dengan pengecualian, sebanyak 8 LKPD memperoleh opini tidak wajar dan 17 LKPD mendapat opini Disclaimer. Kondisi ini tentu menarik untuk dilakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit yang diberikan BPK kepada LKPD, mengingat baru sebesar 31% LKPD yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.

Penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit telah dilakukan. Opini audit dipengaruhi oleh politik (Chan, Lin & Mo, 2006), opini tahun sebelumnya (Nurdiono, 2014 dan Fatimah, Ria & Rusali, 2014), temuan audit (Nuraeni & Martani, 2012 dan Sari, Martani & Setyaningrum, 2015), tindak lanjut atas temuan audit (Sari et al., 2015, Pratiwi & Aryani, 2016), kualitas SDM (Sari, et al., 2015), karakteristik kepala daerah (Wicaksono, Setyaningrum dan Martani, 2013), realisasi anggaran belanja

(Nurdiono, 2014, dan Pratiwi & Aryani, 2016), ukuran pemerintah daerah (Nuraeni & Martani, 2012, Sari, et al., 2015, Pratiwi & Aryani, 2016, Wicaksono et al, 2013), Ketepatanwaktuan LKPD (Rosadi, Siyamto & Aisyiah, 2017), populasi (Nuraeni & Martani, 2012, Wicaksono et al 2013), Umur pemerintah daerah (Wicaksono et al, 2013, Sari, et al., 2015), kekayaan pemerintah daerah (Pratiwi & Aryani, 2016) dan tipe pemerintah daerah (Nuraeni & Martani, 2012, Wicaksono et al, 2013).

Penelitian ini menggunakan struktur formal organisasi dan fungsi administrasi sebagai indikator dari karakteristik pemerintah daerah. Seperti pendapat Damanpour dan Evan (1984) dan Pattrick (2007) yang menemukan bahwa untuk mengadopsi suatu inovasi administrasi, termasuk laporan keuangan, melibatkan struktur formal yang ditunjukkan dengan deferensial fungsi dan proses administrasi yang menunjukkan pelaku adopsi inovasi administrasi. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Aryani (2016), Nuraeni dan Martani (2012) serta Rosadi, Siyamto, dan Aisyiah (2017).

Pratiwi dan Aryani (2016) meneliti pengaruh karakteristik pemerintah daerah (ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat, kekayaan daerah, dan realisasi belanja pemerintah daerah) karakteristik kepala daerah dan tindak lanjut temuan audit terhadap opini BPK. Hasilnya, ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah, tindak lanjut temuan audit, dan masa kerja kepala daerah memiliki pengaruh positif terhadap opini audit, sedangkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat dan realisasi belanja pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap opini audit.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuraeni dan Martani (2012), hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pemerintah daerah (tipe pemerintah daerah dan populasi) memiliki pengaruh positif terhadap opini audit. Ukuran pemerintah daerah dan asistensi BPKP berpengaruh negatif terhadap opini BPK.

Sedangkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat dan kekayaan daerah tidak mempengaruhi opini audit. Hal ini bertolak dengan penelitian yang dilakukan Mustikarini dan Fitriarsari (2012) dan Hilmi dan Martani (2012) yang menyatakan bahwa kekayaan daerah memiliki pengaruh positif dengan pengungkapan LKPD. Semakin banyak kekayaan suatu daerah mestinya membutuhkan pertanggungjawaban yang tinggi dalam pengelolaannya.

Rosadi et al. (2017) menemukan bahwa ketepatan waktu penyampaian keuangan, lemahnya SPI dan kepatuhan peraturan perundang-undangan berpengaruh positif terhadap opini audit, sedangkan ukuran daerah dan tipe daerah tidak mempengaruhi opini BPK. Hasil ini berlawanan dengan temuan DeAngelo (1981) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan yang diaudit memiliki korelasi negatif terhadap kualitas audit, artinya memiliki korelasi positif dengan opini audit.

Penelitian ini dilakukan dengan motivasi hasil penelitian terdahulu yang masih belum konsisten dan terdapat *gap*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh karakteristik pemerintah daerah (ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah, umur pemerintah daerah dan belanja daerah) dan waktu penyampaian laporan keuangan terhadap opini audit

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Organisasi

Organisasi adalah sebuah sistem yang saling mempengaruhi hubungan antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Sutarto, 1993). Didalam organisasi orang-orang saling bekerjasama dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam suatu organisasi pemerintahan suatu organisasi memiliki ciri-ciri yang membedakan antara organisasi pemerintah dengan pemerintah daerah lain. Dalam teori organisasi dipelajari tentang tatacara dan kegiatan apa saja yang dilakukan dalam

suatu organisasi, dalam hal ini kegiatan pemerintahan daerah adalah untuk melakukan tatakelola keuangan dan kebijakan dalam pemerintahan. Pemerintah daerah adalah suatu organisasi dimana tujuan dari pemerintah daerah adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Menurut McAuley, Duberly, dan Johnson (2007) teori organisasi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari bagaimana mengkoordinasi orang-orang di dalamnya dalam mencapai tujuan tertentu.

2.2 Karakteristik Pemerintah Daerah

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2006), karakteristik adalah ciri-ciri khusus; mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian karakteristik pemerintah daerah adalah ciri atau sifat khas yang khusus yang dimiliki masing-masing pemerintah daerah. Karakteristik pemerintah telah digunakan dalam beberapa penelitian, dengan menggunakan beberapa indikator untuk menunjukkan ciri khusus pemerintah daerah. Indikator tersebut diantaranya menggunakan ukuran pemerintah daerah (Patrick 2007, Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011); Nuraeni & Martani, 2012; Sari. et al., 2015; Pratiwi & Aryani 2016; Wicaksono et al 2013), *leverage* (Lin & Raman, 1998; Okfitasari 2015; Okfitasari & Purnomo, 2017), *intergovernmental revenue*, jumlah departemen, intensitas administrasi, spesialisasi tugas, belanja pemerintah (Patrick, 2007; Lin & Raman, 1998; Ingram, 1984; Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011; Okfitasari, 2015; Okfitasari & Purnomo, 2017; Mustikarini & Fitriarsari 2012; Hilmi & Martani, 2012), umur dan tipe pemerintah daerah (Wicaksono et al, 2013; Sari et al., 2015; Nuraeni & Martani, 2012). Dari penelitian itu maka dalam penelitian ini menggunakan variabel karakteristik pemerintahan daerah yaitu ukuran daerah, kekayaan daerah yang diwakili dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah dan umur daerah.

2.3 Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah kepada BPK. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 pemerintah daerah melalui kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan daerah kepada badan pemeriksa keuangan dalam waktu tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Setelah penyampaian laporan keuangan disampaikan oleh pemerintah daerah kepada BPK, kemudian BPK melakukan audit terhadap LKPD yang disusun oleh pemerintah daerah. BPK mendapatkan waktu 2 bulan untuk mengaudit LKPD yang dibuat oleh pemerintah daerah akan tetapi apabila ada kesalahan BPK akan memberikan kesempatan perbaikan kepada pemerintah daerah sebelum BPK memberikan opini terhadap LKPD. Hal inilah yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah jika melakukan penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu maka mereka mendapatkan waktu untuk memperbaiki laporan keuangannya. Waktu penyampaian laporan keuangan sangat berguna untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam mengetahui kesalahan atau kekurangan dalam LKPD yang dibuat oleh pemerintah daerah.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Ukuran Pemerintah Daerah dan Opini Laporan Keuangan

Cohen dan Kaimenakis (2008) menemukan bahwa semakin besar jumlah asset, maka semakin banyak masalah yang akan dihadapi oleh pemerintah daerah terutama dalam pengelolaan sumber daya sehingga jumlah nilai aset yang besar akan memiliki tuntutan yang besar dalam melaporkan pengungkapan wajib ke publik. Temuan ini sejalan dengan temuan Nuraeni dan Martini (2012) serta Wicaksono et al (2013). Semakin besar ukuran suatu pemerintah daerah maka semakin besar aset yang dimilikinya, tentunya ini akan menimbulkan kesulitan dalam tata kelola maupun pertanggungjawabannya. Berdasar uraian ini, dapat dikembangkan hipotesis.

H₁: Ukuran daerah berpengaruh negatif terhadap opini audit BPK.

PAD dan Opini Laporan Keuangan

Sebuah perusahaan menghitung keayaannya dari pendapatan yang dihasilkannya selama proses bisnis perusahaan berjalan selama satu tahun. Begitu juga pemerintah daerah menghitung kekayaan mereka dengan menggunakan pendapatan asli daerah sebagai acuannya. Total PAD menunjukkan apakah daerah tersebut memiliki banyaknya kekayaan atau penghasilan daerahnya. Semakin kaya suatu daerah maka akan semakin baik kualitas pengelolaan keuangan daerah tersebut, dimana pemerintah daerah mampu untuk merekrut tenaga ahli dan menyediakan fasilitas yang memadai dalam mengelola keuangan daerahnya. Hilmi (2010) dan Mustikarini dan Fitri (2012) menemukan pengaruh positif signifikan PAD dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah. Semakin besar PAD pemerintah daerah maka semakin tinggi tingkat kualitas LKPD. Berdasar uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan.

H₂: PAD berpengaruh positif pada opini audit BPK.

Belanja Daerah dan Opini Laporan Keuangan

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 menyatakan, bahwa belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Menurut UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 167 ayat 1, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Okfitasari (2015) menemukan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya semakin tinggi belanja pemerintah daerah, maka seharusnya semakin baik dan berkualitas pelayanan yang diberikan ke masyarakat. Hal ini tentunya menimbulkan semakin kompleks pertanggungjawaban yang harus dilakukan. Nurdiono (2014)

dan Pratiwi dan Aryani (2016) menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara belanja dan opini audit. Banyaknya jenis belanja dalam laporan keuangan daerah, menyebabkan kemungkinan kesalahan dalam pencatatan. Semakin besar jumlah belanja daerah memungkinkan semakin besar juga kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasar uraian di atas, maka hipotesis yang dikembangkan.

H₃: Belanja daerah berpengaruh negatif pada opini audit BPK.

Umur Daerah dan Opini Laporan Keuangan

Penelitian Suhardjanto dan Lesmana (2010) menemukan bahwa umur daerah berpengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Wicaksono et al (2013) menemukan terdapat pengaruh positif antara umur pemerintah daerah terhadap opini audit. Semakin lama umur pemerintah daerah maka akan semakin berpengalaman suatu perusahaan/pemerintah daerah dalam mengelola dan menyusun laporan keuangannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan.

H₄: Umur daerah berpengaruh positif pada opini audit BPK.

Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Opini Laporan Keuangan

Afify (2009) menyatakan bahwa lamanya waktu penyampaian laporan keuangan akan berpengaruh terhadap informasi asimetri dan pengambilan keputusan. Jangka waktu dalam penyampaian laporan keuangan mengindikasikan bagaimana pemerintah daerah menyelesaikan pelaporan keuangannya. Semakin tepat waktu maka menunjukkan pemerintah daerah mampu menyusun laporan keuangan dengan cepat sehingga laporan tersebut bisa diaudit oleh BPK. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan.

H₅: Waktu penyampaian laporan keuangan berpengaruh positif pada opini audit BPK

3. Metode Penelitian

3.1 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan

Populasi penelitian ini yaitu LKPD di Jawa tahun 2013 yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Semua populasi tersebut diambil sebagai sampel, akan tetapi sampel yang digunakan dipilih berdasarkan kriteria tertentu (Sekaran & Bougie, 2010). Kriteria di atas diperlukan karena tidak semua pemerintah daerah menyediakan informasi yang diperlukan. Data diperoleh dari *data base* BPK pada tahun 2013, sedangkan data non keuangan diperoleh dari LHP BPK maupun dari *website* pemerintah daerah di Jawa. Dari data-data yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan di dalam penelitian ini terdapat 2 LKPD yang tidak komplit dalam menyediakan laporan keuangan. Oleh sebab itu maka ada 2 laporan keuangan daerah yang tidak digunakan sebagai sampel. Secara terinci, sampel dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1 Pemilihan Sampel Penelitian

Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah
Jumlah LPKD kota/kabupaten di Pulau Jawa :	113
Tahun 2013	2
Data tidaklengkap	
Jumlah sampel LKPD kota/kabupaten	111

Sumber: Data diolah

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen. Definisi dan pengukuran operasional masing-masing dijelaskan pada Tabel 2.

3.3 Model Analisis Data

Penelitian ini menggunakan alat analisis data yaitu regresi linear berganda dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%. Persamaan regresi berganda dirumuskan berikut ini:

$$\text{OPINI}_{jt} = \alpha + \beta_1 \text{ASET}_{jt} + \beta_2 \text{PAD}_{jt} + \beta_3 \text{BELANJA}_{jt} + \beta_4 \text{UMUR}_{jt} + \beta_5 \text{TIMELINES}_{jt} + \varepsilon_{jt}$$

Tabel 2 Variabel dan Pengukuran Operasional

Variabel	Sub Variabel	Pengukuran	Skala	Sumber
Variabel Independen (X)	Ukuran Pemda(X1)	Total Aset	Ordinal	Patrick (2007); Nuraeni dan Martani (2012); Wicaksono et al (2013)
	PAD (X2)	Total PAD	Ordinal	Nuraeni dan Martani (2012); Pratiwi dan Aryani (2016)
	Belanja (X3)	Total Belanja	Ordinal	Lin dan Raman (1998), Pratiwi dan Aryani (2016); Nurdiono, (2014).
	Umur (X4)	Jumlah Tahun	Ordinal	Wicaksono et al. (2013); Fatimah, et al, 2014
	Waktu Penyampaian laporan keuangan (X5)	Jumlah Hari	Ordinal	Dyer dan Hugh, (1975); Rosadi et al, (2017)
Variabel dependen (Y)	Opini Laporan Keuangan	1Disclaimer 2Tidak Wajar 3WDP 4WTP	Likert	BPK

Tabel 3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Aset	111	1192702.80	37450893.49	4031867.00	4323299.64
PAD	111	59544.94	2791580.05	271100.64	367344.64
Belanja	111	259869.95	5192700.71	1598014.05	849011.18
UMUR	111	5.00	1263.00	363.05	309.94
Timelines	111	80.00	183.00	134.13	18.02
Opini	111	1.00	4.00	3.29	.56

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil penelitian

Analisis deskriptif menjelaskan mengenai data-data dan penyebaran data yang digunakan dalam proses penelitian. Penggambaran umum yang dijelaskan dalam analisis ini meliputi nilai rata-rata (*means*), nilai maksimum, nilai minimum dan nilai penyimpangan atau penyebaran data (standar deviasi) pada penelitian ini.

Dari tabel 3 dapat dilihat nilai aset maximum sebesar 37.450.893,49 dimiliki oleh kota Surabaya dan nilai minimum 1.192.702,80 dimiliki oleh kota Batu, serta nilai rerata total aset sebesar 4.031.867,00. Total PAD maximum sebesar 2.791.580,05 dimiliki oleh kota Surabaya

,sedangkan nilai PAD minimum sebesar 59.544,94 dimiliki oleh kota Batu dengan nilai rerata PAD sebesar 271.100,64. Untuk nilai belanja maximum dimiliki oleh kota Surabaya sebesar 5.192.700,71 sedangkan nilai minimum dimiliki oleh kabupaten Kuningan dengan nilai sebesar 259.869,95 dan nilai rerata dari belanja sebesar 1.598.014,05. Untuk umur pemerintah daerah nilai maximum yaitu 1.263 tahun dimiliki oleh kabupaten, sedangkan nilai minimum umur daerah sebesar 5 tahun dimiliki oleh kota Tangerang Selatan dan nilai rerata 134,12 tahun. Waktu penyampaian laporan keuangan atau timelines tercepat yaitu sebesar 80 hari dimiliki oleh kabupaten Kebumen, sedangkan waktu penyampaian laporan keuangan terlama sebesar

183 hari dimiliki oleh kabupaten Pamekasan dan rerata waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 134 hari. Opini audit laporan keuangan dari 111 pemerintah kabupaten/kota di pulau Jawa 36 kabupaten/kota mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, 73 wajar dengan pengecualian dan 2 *disclaimer*.

Analisis Regresi Berganda

Untuk menjawab tujuan penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan model pengujian regresi linier berganda dengan menggunakan data-data dari masing-masing pemerintah daerah. Dari hasil uji regresi linier berganda diperoleh hasil sebagaimana Tabel 4.

Dari Tabel 4, menunjukkan bahwa karakteristik pemerintah daerah yaitu ukuran daerah, PAD, belanja dan umur daerah serta waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah secara simultan berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah, dimana hasil regresi sebesar 0.005 lebih kecil dari 5%. Adapun nilai *Adjusted R²* sebesar 0,105 menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 10,5%, sedangkan sebesar 89,5% dipengaruhi oleh variabel lain. Berdasarkan hasil di atas, maka persamaan regresi penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

$$OPINI = 4.401 - 2.671ASET + 1.171PAD - 3.388BELANJA - 2.726UMUR - .006TIMELINE$$

Berdasarkan atas hasil analisis regresi linear berganda, maka pengujian hipotesis dapat dipaparkan sebagai berikut:

Ukuran daerah dan opini audit BPK

Dari hasil uji regresi, variabel ukuran daerah menunjukkan bahwa ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap opini audit BPK. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi sebesar 0,393 yang berarti nilai signifikansi variabel ukuran daerah lebih besar dari 0,05. Dengan demikian Hipotesis 1 ditolak dimana hipotesis beranggapan bahwa ukuran daerah berpengaruh negatif terhadap opini audit BPK. Temuan ini tidak sejalan dengan Nuraeni dan Martani (2012), Wicaksono et al (2013), Sari, et al. (2015) yang menemukan terdapat pengaruh negatif antara ukuran pemerintah daerah terhadap opini audit. Hasil ini sejalan dengan temuan Rosadi et al. (2017) dan Fatimah et al. (2014) yang menemukan tidak adanya pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap opini audit. Hal ini kemungkinan disebabkan karena ukuran daerah tidak begitu berpengaruh terhadap tatakelola keuangan. Hal ini dapat dilihat dari pemerintah kota Surabaya meskipun memiliki total aset paling besar akan tetapi dengan luas wilayah dan sumber daya manusia yang memadai, maka tidak menjadi masalah dalam tatakelola keuangan aset yang besar.

Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	Nilai t	Sig.
(Constant)	4.401	10.904	.000
ASET	-2.671E-8	-.858	.393
PAD	1.171E-6	2.936	.004*
BELANJA	-3.388E-7	-3.166	.002*
UMUR	-2.726E-5	-.163	.870
Timelines	-.006	-1.994	.049*
<i>R Square</i>			.146
<i>Adj. R Square</i>			.105
<i>Nilai f</i>			3.579
<i>Regression*</i>			.005*

PAD dan opini audit BPK

Dari hasil uji regresi, variabel PAD memiliki pengaruh positif terhadap opini audit BPK. Hal ini dibuktikan dari nilai signifikansi variabel PAD sebesar 0,004 dengan koefisien 1,171, yang berarti nilai signifikansi variabel PAD lebih kecil dari 0,05, sehingga variabel PAD berpengaruh positif signifikan terhadap opini Audit BPK. Dengan demikian Hipotesis 2 diterima. Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Aryani (2016). Hasil ini juga mendukung bahwa semakin tinggi PAD yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka akan semakin tinggi pula tingkat pengungkapan LKPD (Hilmi & Martani, 2010) dan kinerja pemerintah daerah (Mustikarini & Fitria, 2012). Dengan PAD yang tinggi, maka pemerintah daerah dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan daerahnya, dimana salah satunya adalah perbaikan tatakelola keuangan pemerintah daerah.

Belanja Daerah dan opini audit BPK

Dari hasil uji regresi, variabel belanja daerah diperoleh pengaruh negatif terhadap opini audit BPK. Variabel belanja daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 dengan koefisien yang berarti nilai signifikansi variabel belanja daerah lebih kecil dari 0,05, sehingga variabel belanja daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap opini audit BPK. Hipotesis 3 diterima. Hasil ini mendukung temuan Nurdiono (2014) dan Pratiwi dan Aryani (2016). Belanja daerah sangat rawan dalam pengelolaannya, dimana banyak celah yang digunakan untuk melakukan korupsi karena anggaran belanja digunakan untuk peningkatan kualitas masyarakat. Semakin besar belanja daerah, maka semakin kompleks dan sulit untuk mempertanggungjawabkan dengan baik, sehingga rawan penyimpangan yang berakibat penurunan opini audit.

Umur daerah dan opini audit BPK

Dari hasil uji regresi, variabel umur daerah tidak berpengaruh terhadap opini audit BPK. Variabel umur Pemda memiliki nilai signifikansi sebesar 0,870 yang berarti nilai signifikansi variabel umur Pemda lebih besar dari 0,05,

sehingga umur Pemda tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit BPK. Hipotesis 4 ditolak. Penelitian ini tidak mendukung temuan Sari, et al. (2015) dan Wicaksono et al (2013) yang menyatakan umur pemda berpengaruh terhadap opini audit dan kualitas laporan keuangan (ketepatanwaktuan) (Taufik & Bandi, 2015). Disisi lain, temuan ini mendukung hasil penelitian Fatimah et al. (2014) yang menemukan bahwa umur pemda tidak mempengaruhi opini audit. Hasil ini mendukung temuan Okfitasari (2015) yang menyatakan bahwa umur pemda tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kondisi ini dimungkinkan adanya umur daerah yang pendek dari pemda baru yang merupakan daerah pemekaran dari daerah lain sebelumnya, sehingga pengelolaan keuangan daerah masih dikelola oleh tenaga yang sama hanya saja daerah tersebut telah mengalami pemekaran. Dengan demikian pengalaman umur daerah yang sudah lama berdiri tidak ada bedanya dengan daerah yang baru saja berdiri, karena pengelola keuangan yang bekerja di daerah yang baru sebagian merupakan berasal dari daerah yang mengalami pemekaran.

Waktu penyampaian laporan keuangan dan opini audit BPK

Dari hasil uji regresi, variabel waktu penyampaian laporan keuangan berpengaruh terhadap opini audit BPK. Hasil uji regresi variabel waktu penyampaian laporan keuangan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,049, akan tetapi variabel ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan berpengaruh negatif terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah. Hipotesis 5 ditolak. Temuan ini mendukung penelitian Rosadi et al. (2017). Hasil ini mendukung penelitian Rachmawati, Rini dan Fitri (2016) yang menyatakan bahwa opini audit mempengaruhi positif ketepatanwaktuan penyampaian laporan keuangan. Artinya jika opini yang diberikan baik, maka semakin pendek waktu penyampaian LKPD. Semakin lama penyampaian laporan keuangan, maka semakin rendah opini yang didapatkan. Semakin cepat waktu penyampaian laporan keuangan menunjukkan

kesiapan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dengan analisis regresi berganda, maka diperoleh hasil, bahwa H2 dan H3 yang diterima, sedangkan H1 dan H4 ditolak, sedangkan H5 walaupun memiliki pengaruh yang signifikan, tetapi koefisiennya negatif, sehingga H5 tidak sesuai dengan hipotesis. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif terhadap opini audit. Hal ini menunjukkan semakin besar pendapatan yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah maka akan semakin bagus opini yang diperoleh. Adapaun belanja daerah dan waktu penyampaian laporan keuangan memiliki pengaruh negatif terhadap opini audit. Semakin pendek waktu penyampaian laporan keuangan, maka semakin tepat dan cepat penyusunan laporan keuangan, sehingga memperoleh opini audit yang lebih baik. Semakin besar belanja daerah, maka semakin banyak celah penyimpangan pencatatannya, sehingga semakin banyak kesalahan pelaporan laporan keuangan yang akhirnya akan menurunkan opini audit.

Keterbatasan penelitian ini ialah penggunaan sampel tahun 2013 saja dan terbatas hanya di Pulau Jawa. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti merekomendasikan untuk menambah variabel independen lainnya, mengingat bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan sebesar 10,5% saja atas variabel dependen. Selain itu, penelitian selanjutnya perlu menambah jumlah sampel penelitian agar hasil penelitian lebih representatif dan juga tidak hanya memfokuskan pada pemerintah daerah di Pulau Jawa.

6. Daftar Pustaka

- Afify, H. A. E. (2009). Determinants of Audit Report Lag: Does Implementing Corporate Governance Have Any Impact? Empirical Evidence From Egypt. *Journal of Applied Accounting Research*, 56–86.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2015). *Laporan Hasil Pemeriksaan Semester 1*. Diakses melalui www.bpk.go.id
- Chan, K. H., Lin, K. Z., & Mo, P. L. L. (2006). A political-economic analysis of auditor reporting and auditor switches. *Review of Accounting Studies*, 11(1), 21-48.
- Chang, X., Dasgupta, S., & Hilary, G. (2009). The effect of auditor quality on financing decisions. *The Accounting Review*, 84(4), 1085-1117.
- Cohen, S & Kaimenakis, N. (2008). An Empirical Investigation of Greek Municipalities' Quality of Financial Reporting. *Working paper series*
- Damanpour, F., & Evan, W. M. (1984). Organizational innovation and performance: the problem of "organizational lag". *Administrative science quarterly*, 392-409.
- DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. *Journal of accounting and economics*, 3(3), 183-199.
- Dyer, J. C., & McHugh, A. J. (1975). The timeliness of the Australian annual report. *Journal of Accounting Research*, 204-219.
- Fatimah, D., Ria, N. S., & Rasuli, M. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Seluruh Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1-15.
- Hilmi, A., & Martani, D. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. *Dipresentasikan dalam Simposium Nasional Akuntansi XV: Banjarmasin*.
- Lin, W., & Raman, K. K. (1998). The housing value-relevance of governmental accounting information. *Journal of Accounting and Public Policy*, 17(2), 91-118.
- McAuley, J., Duberley, J., & Johnson, P. (2007). *Organization theory: Challenges and perspectives*. Pearson Education.
- McLelland, A. J., & Giroux, G. (2000). An empirical analysis of auditor report timing by large municipalities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 19(3), 263-281.

- Mustikarini, W. A., & Fitriyanti, D. (2012). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2007. *Simposium Nasional Akuntansi XV: Banjarmasin*.
- Nuraeni & Martani, D. (2012). *The Impact of Local Governments Characteristics toward Their Audit Quality For Financial Reports of 2008-2009*. Dipresentasikan pada AAIC Airlangga Accounting International Conference & Doctoral Colloquium 2012 "Governance, Competitive Advantages, and Accounting Issues in Emerging Countries", Nusa Dua – Bali, 28 – 29 Juni 2012.
- Nurdiono, (2014) Analisis Hasil Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia. Disertasi Dipublikasikan. Universitas Gadjah Mada. (http://etd.-repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=70810).
- Okfitasari, A. (2015). Karakteristik Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris: Pemerintah Daerah Se-Jawa Tengah), *Jurnal Sainstech Vol 2 No 4 , Desember 2015*.
- Okfitasari, A., & Purnomo, S. (2017). The Impact of The Local Governmental Characteristic on The Relevant Accounting Information of Local Governmental Financial Statement. *Dipresentasikan pada 5th International Conference at Huachiew Chalermprakiet University Thailand tanggal 26 Mei 2017*.
- Patrick, P. A. (2007). *The determinants of organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government* (Doctoral dissertation, Pennsylvania State University).
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pratiwi, R., & Aryani, Y. A. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Tindak Lanjut Temuan Audit terhadap Opini. *Jurnal Akuntansi, 20(2), 167-189*.
- Rachmawati, S., Rini, R., & Fitri, Y. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Akuntabilitas, 9(1)*.
- Rosadi, S., Siyamto, Y., & Aisyiah, H. N. (2017). Pengaruh Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan, Status Daerah Dan Ukuran Daerah Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa Tahun 2013. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3(02), 99-111*.
- Sari, A. P., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kualitas sumber daya manusia terhadap opini audit melalui tingkat pengungkapan laporan keuangan kementerian/lembaga. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill building approach*. John Wiley & Sons.
- Suhardjanto, D., & Lesmana, S. I. (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib di Indonesia. *PRESTASI, 6(02)*.
- Sutarto, (1993). *Dasar-dasar Organisasi*. Gajah Mada University Press.
- Taufik, M. G., & Bandi, B. (2015). Karakteristik Pemerintah Daerah Karakteristik Kepala Daerah, Karakteristik Inspektorat Daerah dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 15(1), 65-73*.
- Wicaksono, P., Setyaningrum, T.D., & Martani, D. (2013). Audit Opinion and Audit Findings' Determinants of Indonesia's Supreme Audit Institution", *The 25th Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues*, Grand Hyatt, Nusa Dua – Bali, Indonesia, 10 – 13 November 2013.